

**LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN  
NEGARA DAN LELANG KISARAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

# Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023  
(Audited)

# KATA PENGANTAR

## MELLY MAIESTA Kepala KPKNL Kisaran



Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran /Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran adalah salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kisaran, 13 Mei 2024  
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik  
MELLY MAIESTA  
NIP 1976311999032001



# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	i	<b>V. Catatan Atas Laporan Keuangan</b>	7
<b>Daftar Isi</b>	ii	<b>Penjelasan Umum</b>	7
<b>Pernyataan Tanggung Jawab</b>	iii	<b>Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran</b>	23
<b>Ringkasan Laporan</b>	1	<b>Penjelasan atas Pos-Pos Neraca</b>	31
<b>I. Laporan Realisasi Anggaran</b>	3	<b>Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional</b>	41
<b>II. Neraca</b>	4	<b>Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas</b>	47
<b>III. Laporan Operasional</b>	5	<b>Pengungkapan Penting Lainnya</b>	51
<b>IV. Laporan Perubahan Ekuitas</b>	6	<b>VI. Lampiran dan Daftar</b>	53



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**SUMATERA UTARA**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN**  
JALAN PROF. H. M. YAMIN S.H. NO. 47 KODE POS 21219 TELEPON (0623) 41660 FAKSIMILE 0623- 42520

---

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Tahun 2023 (*Audited*) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan Tahun 2023 (*Unaudited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Tahun 2023 (*Audited*) tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kisaran, 13 Mei 2024  
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik  
Melly Maiesta



Laporan Keuangan KPKNL Kisaran Tahun 2023 (Audited) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintahan, Laporan Keuangan ini meliputi :

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2023 (Audited) adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.747.312.491,00 atau mencapai 178,37 % dari Estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.540.241.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2023 (Audited) adalah sebesar Rp1.777.583.676,00 atau mencapai 93,23 % dari alokasi anggaran sebesar Rp1.906.674.000,00.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp14.593.549.183,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp225.908.101,00, Aset Tetap (neto) sebesar Rp14.367.641.082,00; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0,00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan *Ekuitas* masing-masing sebesar Rp222.659.503,00 dan Rp14.370.889.680,00.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.641.313.014,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp2.246.542.931,00 sehingga terdapat surplus dari kegiatan Operasional senilai Rp394.770.083,00 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-

Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp100.313.000,00 dan sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp495.083.083,00

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp14.628.537.026,00 ditambah surplus-LO sebesar Rp495.083.083,00 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp2.444.445,00 dan dikurangi transaksi antar entitas sebesar (Rp755.174.874,00) sehingga ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp14.370.889.680,00.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 (Audited) disusun dan disajikan dengan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan  
31 Desember 2023 Dan 31 Desember 2022

Uraian	Catatan	Tahun 2023 (Audited)			31 Desember 2022 (Audited)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi thdp Anggaran	Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1.540.241.000,00	2.747.312.491,00	178,37	2.977.003.848,00
Jumlah Pendapatan		1.540.241.000,00	2.747.312.491,00	178,37	2.977.003.848,00
<b>BELANJA</b>					
<b>Belanja Operasi</b>					
Belanja Pegawai	B.3	0,00	0,00	0	0
Belanja Barang	B.4	1.843.496.000,00	1.714.455.733,00	93,00	1.580.702.154,00
Belanja Bantuan Sosial	B.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Operasi		1.843.496.000,00	1.714.455.733,00	93,00	KPKNL Kisaran
<b>Belanja Modal</b>					
Belanja Tanah	B.6	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	B.7	63.178.000,00	63.127.943,00	99,92	0,00
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8	0,00	0,00	0	0,00
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.9	0,00	0,00	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	B.10	0,00	0,00	0	0,00
Belanja Modal BLU	B.11	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal		63.178.000,00	63.127.943,00	99,92	0,00
Jumlah Belanja		1.906.674.000,00	1.777.583.676,00	93,23	1.580.702.154,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

## II. NERACA

Neraca  
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	4.155.084,00	42.000,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	205.721.729,00	25.570.907,00
Kas pada BLU	C.4	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek – BLU	C.5	0,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka	C.6	0,00	0,00
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.7	0,00	0,00
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.8	0,00	4.727.144,00
Piutang Bukan Pajak	C.9	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	C.10	0,00	0,00
Bagian Lancar TP/TGR	C.11	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih TP/TGR	C.12	0,00	0,00
Piutang dari kegiatan Operasional BLU	C.13	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.14	0,00	0,00
Persediaan	C.15	16.031.288,00	5.690.788,00
Persediaan Belum diregister	C.16	0,00	0,00
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>225.908.101,00</b>	<b>36.030.839,00</b>
<b>Piutang Jangka Panjang</b>			
Tagihan TP/TGR	C.17	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	C.18	0,00	0,00
<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aset Tetap</b>			
Tanah	C.19	7.066.601.000,00	7.066.601.000,00
Peralatan dan Mesin	C.20	3.774.601.588,00	3.761.880.672,00
Gedung dan Bangunan	C.21	7.483.185.960,00	7.483.185.960,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.22	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	C.23	9.969.500,00	9.969.500,00
KDP	C.24	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	C.25	(3.966.716.966,00)	(3.689.899.680,00)
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.26	0,00	0
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>14.367.641.082,00</b>	<b>14.631.737.452,00</b>
<b>Aset Lainnya</b>			
Aset Tak Berwujud	C.27	0,00	0,00
Dana yang dibatasi penggunaannya	C.28	0,00	0,00
Dana Kelolaan Badan Layanan Umum	C.29	0,00	0,00
Dana Jangka Panjang	C.30	0,00	0,00
Aset Lain-lain	C.31	285.487.300,00	0,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.32	(285.487.300,00)	0,00
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>14.593.549.183,00</b>	<b>14.667.768.291,00</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.33	216.184.503,00	35.384.237,00
Utang yang belum ditagihkan	C.34	0,00	0,00
Hibah yang Belum Disahkan	C.35	0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.36	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	C.37	0,00	0,00
Uang Muka dari KPPN	C.38	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.39	0,00	4.675.025,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>222.659.503,00</b>	<b>39.231.265,00</b>
<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>			
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	C.40	0,00	0,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>222.659.503,00</b>	<b>39.231.265,00</b>
<b>EKUITAS</b>			

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

## Laporan Keuangan KPKNL Kisaran Tahun 2023

Ekuitas	C.41	14.370.889.680,00	14.628.537.026,00
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>14.370.889.680,00</b>	<b>14.628.537.026,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>14.593.549.183,00</b>	<b>14.667.768.291,00</b>

## II. LAPORAN OPERASIONAL

*Laporan Operasional*  
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	2.641.313.014,00	2.972.651.875,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>2.641.313.014,00</b>	<b>2.972.651.875,00</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	0,00	0,00
Beban Persediaan	D.3	67.139.317,00	86.468.667,00
Beban Barang & Jasa	D.4	948.153.176,00	918.087.215,00
Beban Pemeliharaan	D.5	405.062.809,00	339.860.902,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	284.409.375,00	232.620.552,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	541.778.254,00	536.109.920,00
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	D.8	0,00	0,00
Beban Lain-lain	D.9	0,00	0,00
<b>Jumlah Beban</b>		<b>2.246.542.931,00</b>	<b>2.113.147.256,00</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		<b>394.770.083,00</b>	<b>859.504.619,00</b>
<b>Kegiatan Non Operasional</b>			
Surplus (Defisit) penjualan aset non-Lancar	D.10	100.313.000,00	2.780.000,00
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.11	0,00	0,00
Surplus (Defisit) dari kegiatan non operasional lainnya	D.12	0,00	0,00
<b>Surplus (Defisit) dari kegiatan non operasional</b>		<b>100.313.000,00</b>	<b>2.780.000,00</b>
<b>Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa</b>		<b>495.083.083,00</b>	<b>862.284.619,00</b>
<b>Pos Luar Biasa</b>			
Pendapatan PNB		0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas		0,00	0,00
Beban Persediaan		0,00	0,00
<b>Surplus/Defisit LO</b>		<b>495.083.083,00</b>	<b>862.284.619,00</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Laporan Perubahan Ekuitas*  
*Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>Ekuitas Awal</b>	<b>E.1</b>	<b>14.628.537.026,00</b>	<b>15.083657.995,00</b>
<b>Surplus/Defisit LO</b>	<b>E.2</b>	<b>495.083.083,00</b>	<b>862.284.619,00</b>
Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan		0,00	0,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		0,00	0,00
<b>Lain-lain</b>			
Penyesuaian nilai aset	E.3	0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	E.4	0,00	0,00
Koreksi atas Reklasifikasi	E.5	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset	E.6	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.7	0,00	387.981,00
Koreksi Lain-lain	E.8	2.444.445,00	0,00
<b>Jumlah Lain-lain</b>		<b>2.444.445,00</b>	<b>387.981,00</b>
Transaksi Antar Entitas	E.9	(755.174.874,00)	(1.317.793.569,00)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E.10	(257.647.346,00)	(455.120.969,00)
<b>Ekuitas Akhir</b>		<b>14.370.889.680,00</b>	<b>14.628.537.026,00</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

**A. PENJELASAN UMUM**

*Dasar Hukum*

**A.1. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas PMK Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
9. Peraturan menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian LKKL sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2018 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup BUN dan Kementerian Negara/Lembaga.
11. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2012 tentang tentang Penatausahaan Hasil Pengurusan Piutang dan Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Informasi Akrual

Pada Laporan Keuangan.

13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

## A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis

KPKNL Kisaran dibentuk dengan tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. KPKNL Kisaran diharapkan dapat memfasilitasi tercapainya tertib administrasi, tertib hukum, tertib fisik dalam pengelolaan kekayaan negara, piutang Negara, dan lelang.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Kisaran berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan dan kekayaan negara, piutang negara dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat sesuai dengan visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu **“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”**. Pengertian **profesional** dalam visi tersebut bermakna bahwa tugas-tugas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. **Akuntabel** adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. **Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat** adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat.

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 6 (enam) misi yaitu:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.

2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah.
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. **Tujuan** yang hendak dicapai oleh KPKNL Kisaran untuk periode 2019-2024 adalah terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi stakeholder.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, KPKNL Kisaran telah menentukan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur dan telah ditetapkan secara spesifik serta dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Sesuai dengan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2019-2024, terdapat 7 (tujuh) **sasaran** yang terkait dengan KPKNL Kisaran yaitu:

1. Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal.  
Mengkoordinasikan pemberian data dan informasi keberadaan *asset idle* K/L dalam rangka perencanaan pengadaan belanja modal dari K/L.
2. Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang andal dan akuntabel.  
Penatausahaan kekayaan negara yang andal dan akuntabel adalah tercatatnya seluruh kekayaan negara/BMN dalam daftar barang baik di K/L sebagai pengguna dan di Kementerian Keuangan c.q. DJKN sebagai pengelola.
3. Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip *the highest and best use*. Pemanfaatan BMN adalah upaya penggunaan secara maksimal

seluruh BMN untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggara negara.

4. Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara.

Pelayanan pengelolaan kekayaan negara meliputi pelayanan permohonan penetapan status, pemanfaatan, penggunaan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara.

5. Terwujudnya *database* nilai kekayaan negara yang kredibel.

Mendapatkan, mengumpulkan, dan mengolah data kekayaan negara sehingga menjadi informasi eksekutif yang utuh, tepat waktu, akurat, dan dapat digunakan untuk proses pengambilan keputusan.

6. Tingkat pendapatan yang optimal.

Tingkat pendapatan yang optimal adalah tingkat pencapaian penerimaan dalam negeri yang sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN-P.

7. Tingkat kepercayaan *stakeholders* yang tinggi dan citra yang meningkat dengan didukung oleh tingkat pelayanan yang andal.

Tingkat kepercayaan *stakeholders* yang tinggi diukur berdasarkan hasil survei kepuasan *stakeholder* oleh lembaga independen atau internal DJKN. Hasil survei yang positif akan meningkatkan citra DJKN di mata *stakeholder*.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan **strategi** yang harus ditempuh oleh KPKNL Kisaran. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Strategi KPKNL Kisaran yang akan ditempuh adalah:

1. Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang.
2. Menatausahakan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang dengan akurat dan akuntabel.
3. Meningkatkan pengamanan kekayaan negara baik secara administrasi, fisik dan tertib hukum.
4. Mengintegrasikan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN)

dengan penganggaran.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang.
6. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara termasuk aset idle dan pengurusan piutang negara.
7. Meningkatkan penerimaan kembali (*recovery*) yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBN dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
8. Meningkatkan kesadaran (*awareness*) dan kemitraan dengan *stakeholder* dalam pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang.
9. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang.
10. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Organisasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan Pengelolaan Anggaran.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, KPKNL Kisaran melaksanakan **program**: Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh KPKNL Kisaran untuk mendapatkan suatu hasil.

#### Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Kisaran Tahun 2023

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Indeks Max. 120%
	Stakeholder Perspective (30%)				33,64%
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan				112,14%
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan	P/M	100%	139,95%	120,00%

Laporan Keuangan KPKNL Kisaran Tahun 2023

	kekayaan negara dan lelang				
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	80%	131,25%	120,00%
1c-CP	Indeks integritas	P/L	88,67	89,17	100,56%
	Customer Perspective(20%)				24,00%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa				120,00%
2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	140,13%	120,00%
2b-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	P/M	100%	209,73%	120,00%
	Internal Process Perspective (25%)				29,21%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal				116,25%
3a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan	P/L	68%	74,62%	109,73%
3b-CP	Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan	P/L	100%	178,26%	120,00%
3c-CP	Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	125,00%	120,00%
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional				120,00%
4a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	25%	0,00%	120,00%
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang				114,22%

	Efektif				
5a-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	94%	100%	106,38%
5b-CP	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	P/M	86%	100%	116,28%
5c-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/M	100%	123,33%	120,00%
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif				112,96%
6a-CP	Tingkat tindak lanjut persetujuan pengelolaan barang milik negara	P/L	86%	97,14%	112,96%
	Learning & Growth Perspective (25%)				28,65%
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif				120,00%
7a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	120,00%
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal				113,81%
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	100,0	101,44	101,44%
8b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	P/M	15%	0%	120,00%
8c-N	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	P/M	100%	120%	120,00%
9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang				110,00%

	Efektif				
9a-CP	Indeks pengawasan dan pengendalian yang efektif	P/M	60	97,00	120,00%
9b-CP	Indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko	P/M	80	99,67	120,00%
9c-N	Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	P/M	100	90,00	90,00%
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>					<b>115,50%</b>

### A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

*Pendekatan  
Penyusunan Laporan  
Keuangan*

Laporan Keuangan Tahun 2023 (Audited) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPKNL Kisaran. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI terdiri dari beberapa Modul, yaitu Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Bendahara, Modul Piutang, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap dan Modul General Ledger Pelaporan (GLP). SAKTI Modul GLP diantaranya dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas, laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Jumlah entitas akuntansi satuan kerja KPKNL Kisaran adalah 1 entitas.

### A.4 Basis Akuntansi

*Basis Akuntansi*

KPKNL Kisaran menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara

kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### **A.5 Dasar Pengukuran**

##### *Dasar Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan KPKNL Kisaran dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah

#### **A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 (Audited) telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan KPKNL Kisaran adalah sebagai berikut:

- **Pendapatan – LRA**

*Pendapatan - LRA*

Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.

Pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

- **Pendapatan-LO**

*Pendapatan - LO*

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

- Penerimaan Bea Lelang Batal Atas Permintaan Penjual (setoran SSBP menggunakan MAP 425782). Pendapatan diakui pada saat diterimanya surat pemberitahuan pembatalan dari penjual oleh Kepala KPKNL dan disetor ke Rekening Penampungan Lelang KPKNL;
- Penerimaan Uang Jaminan Penawaran Lelang dari Pembeli Wanprestasi (setoran SSBP menggunakan MAP 425782). Pendapatan diakui pada saat telah ditetapkannya Pembeli

Lelang wanprestasi oleh Pejabat Lelang;

- Penerimaan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dari Penanggung Hutang (setoran SSBP menggunakan MAP 425785). Pendapatan diakui pada saat telah pastinya pembayaran angsuran atau penarikan yang dindikasikan oleh telah diterimanya pembayaran oleh Bendahara Penerima atau telah masuk ke dalam rekening Bendahara Penerima dan telah terverifikasi.
- Penyetoran atas Penerimaan Piutang Negara Yang Tidak Jelas (setoran SSBP menggunakan MAP 425999). Pendapatan diakui setelah Proses verifikasi dan konfirmasi dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak penerimaan tersebut masuk ke Rekening Penampungan Piutang dan telah disetorkan ke Kas Negara;
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

- **Belanja**

*Belanja*

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- **Beban**

*Beban*

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa

pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- **Aset**

*Kebijakan  
Akuntansi atas  
Aset*

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

- **Aset Lancar**

*Aset Lancar*

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perhendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat

peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,

- c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut :

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/ DJKN	100%
-------	--	------

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

#### a. Aset Tetap

##### *Aset Tetap*

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - (a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - (b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- (c). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang jdih.kemenkeu.go.id - 240 - (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
  - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

## **b. Penyusutan Aset Tetap**

### *Penyusutan Aset Tetap*

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji dalam tabel berikut.

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

**c. Piutang Jangka Panjang**

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- Tuntutan Perbendaharaan (TP) adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.
- TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

#### **d. Aset Lainnya**

##### *Aset Lainnya*

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,

- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten 10 tahun Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga 20 tahun Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni 25 tahun Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. 50 tahun II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

## 6. Kewajiban

### Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban

jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

**a. Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

**b. Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

**B. Ekuitas**

*Ekuitas*

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**C. Implementasi Sistem Akuntansi Tingkat Instansi (SAKTI)**

*Implementasi  
Akuntansi  
Pemerintah  
Berbasis Akrual  
Pertama Kali*

Mulai tahun 2018 KPKNL Kisaran telah mulai melaksanakan implementasi SAKTI (Sistem Akuntansi Tingkat Instansi) yang mengintegrasikan seluruh aplikasi yang berkaitan dengan laporan keuangan yaitu RKAKL-DIPA, SAS/SPM, Persediaan, SIMAK BMN & SAIBA, yang terdiri dari beberapa modul yaitu modul penganggaran, komitmen, PPSPM, bendahara pengeluaran/penerimaan, piutang, aset tetap, persediaan dan

General Ledger Pelaporan (GLP). Untuk KPKNL Kisaran ini pelaksanaan implementasi SAKTI nya termasuk ke dalam Tahap IIIB yang mana sebelumnya sudah dilakukan implementasi SAKTI pada internal Ditjen Perbendaharaan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama. Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2017 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis full akrual.

#### D. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam Penanganan Pandemi COVID-19

Terkait  
Penanganan  
Pandemi  
COVID-19

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan

Pandemi COVID-19, dijelaskan mengenai Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam penanganan pandemic COVID-19 sebagai berikut:

Akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19 menjadi bagian dari laporan keuangan yang disusun oleh entitas akuntansi dan/ atau entitas pelaporan;

- Laporan keuangan sebagaimana dimaksud disusun menggunakan system aplikasi pelaporan dan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual;

- Pencatatan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan

pandemi COVID-19 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat;

- Entitas akuntansi dan atau entitas pelaporan melakukan pengungkapan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19 secara memadai dalam catatan atas

laporan keuangan sebagai bagian dari peristiwa luar biasa;

- Dalam hal diperlukan, entitas akuntansi dan/ atau entitas pelaporan

dapat menyusun laporan manajerial transaksi belanja atas beban

APBN dalam penanganan pandemi COVID-19 sebagai laporan pendukung dan dapat menjadi bagian dari laporan keuangan.

Sesuai Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 status pandemi COVID-19 dinyatakan telah berakhir dan status pandemi COVID-19 berubah menjadi penyakit endemi di Indonesia yang mulai berlaku tanggal 21 Juni 2023, sehingga dengan terbitnya Keputusan Presiden tersebut, maka akun khusus COVID-19 hanya dapat digunakan sampai dengan berakhirnya status pandemic COVID-19 atau Semester I 2023.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pagu belanja  
Rp1.906.674.000,  
00.

Satuan kerja KPKNL Kisaran memperoleh alokasi anggaran Tahun 2023 (Audited) sebesar Rp1.906.674.000,00.

Realisasi  
Pendapatan  
Negara dan  
Hibah  
Rp2.747.312.491,  
00

### B.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir

pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.747.312.491,00 atau mencapai 178,37 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.540.241.000,00. Pendapatan Satuan Kerja KPKNL Kisaran terdiri dari pendapatan jasa lainnya, pendapatan, bunga, pengelolaan rekening Perbankan dan iuran badan serta pendapatan denda, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian estimasi dan realisasi PNBPN sampai dengan tanggal pelaporan dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

NO	Kode Akun   Jenis Pendapatan	Estimasi Pendapatan	Realisasi
1	425785   Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	1.207.770	1.207.770
2	425784   Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1.011.788.930	1.011.788.930
3	425782   Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	1.624.435.787	1.624.435.787
4	425129   Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	100.313.000	100.313.000
5	425995   Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	385.015	385.015
6	425131   Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	8.680.000	8.680.000
7	425699   Pendapatan Jasa Lainnya	501.989	501.989
	Jumlah	2.747.312.491	2.747.312.491

Realisasi PNBPN Tahun 2023 (Audited) mengalami penurunan sebesar Rp(229.691.357,00) atau (7,72)% dari realisasi 31 Desember 2022 yaitu Rp2.977.003.848,00. Perbandingan realisasi PNBPN Tahun 2023 (Audited) dan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Laporan Keuangan KPKNL Kisaran Tahun 2023

NO	Uraian	Tahun 2023 (Unaudited)	Tahun 2022 (Audited)	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	1.207.770	793.123	414.647	52%
2	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1.011.788.930	693.916.638	317.872.292	46%
3	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	1.624.435.787	2.271.237.087	- 646.801.300	-28%
4	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	100.313.000	2.780.000	97.533.000	3508%
5	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	385.015	-	385.015	0%
6	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	8.680.000	8.277.000	403.000	5%
7	Pendapatan Jasa Lainnya	501.989	-	501.989	0%
	Jumlah	2.747.312.491	2.977.003.848	- 229.691.357	-8%

**B.2. Belanja**

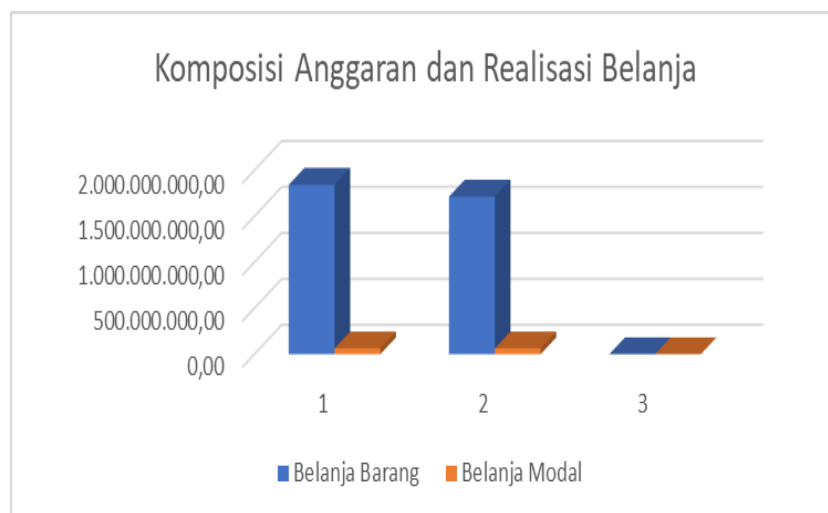
Realisasi Belanja  
Negara  
Rp1.777.583.676,00

Realisasi belanja *KPKNL Kisaran* pada *Tahun 2023 (Audited)* adalah sebesar Rp1.777.583.676,00 atau sebesar 93,23 persen dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp0,00. Anggaran belanja *KPKNL Kisaran Tahun 2023 (Audited)* adalah sebesar Rp1.906.674.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja *Tahun 2023 (Audited)* dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
52	Belanja Barang	1.843.496.000,00	1.714.455.733,00	93,00
53	Belanja Modal	63.178.000,00	63.127.943,00	99,92
	Total Belanja Kotor	1.906.674.000,00	1.777.583.676,00	93,23
	Pengembalian	0	0,00	0,00
	Total Belanja Netto	1.906.674.000,00	1.777.583.676,00	93,23

Komposisi anggaran dan realisasi belanja Tahun 2023 (Audited) dapat dilihat pada grafik berikut :



Realisasi belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp196.881.522,00 dibandingkan periode yang berakhir pada 31 Desember 2022. Kenaikan tersebut disebabkan karena penyebaran pandemi COVID 19 di tahun 2023 sudah semakin melandai dan aktifitas perkantoran juga sudah semakin pulih sehingga kebutuhan terhadap sarana dan prasarana penunjang aktifitas perkantoran juga semakin meningkat, disamping itu pada tahun 2023 terdapat realisasi belanja modal peralatan dan mesin berupa kendaraan dinas jabatan.

Realisasi belanja KPKNL Kisaran per kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 (Audited) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Total		
		Pagu	Realisasi	%
4700	Legislasi dan Litigasi	12.053.000	10.584.560	87,82%
4701	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	1.629.054.000	1.549.999.628	95,15%
4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	7.634.000	2.938.000	38,49%
4704	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	10.736.000	8.667.000	80,73%
4796	Komunikasi Edukasi dan Standardisasi	2.407.000	1.596.000	66,31%
4798	Pengelolaan Aset	244.790.000	203.798.488	83,25%
Jumlah		1.906.674.000	1.777.583.676	93%

Perbandingan realisasi belanja Tahun 2023 (Audited) dan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Naik/(Turun)	
		Tahun 2023 (Audited)	31 Desember 2022	Rp	%
51	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0
52	Belanja Barang	1.714.455.733,00	1.580.702.154,00	133.753.579,00	8,46
53	Belanja Modal	63.127.943,00	0,00	63.127.943,00	0
	Jumlah	1.777.583.676,00	1.580.702.154,00	196.881.522,00	12,46

### B.3 Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai*  
Rp0,00

Belanja Pegawai adalah pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, Pegawai Negari Sipil (PNS) dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dikerjakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tidak ada realisasi karena mulai 1 Agustus 2020 pembayaran gaji pegawai sudah dipindahkan terpusat di Kantor Pusat DJKN dan terhitung mulai 1 Juli 2022 pembayaran gaji dipusatkan pada satker Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, sehingga pada satker KPKNL Kisaran tidak ada pagu maupun realisasi pembayaran untuk periode laporan ini.

### B.4 Belanja Barang

*Belanja Barang*  
Rp1.714.455.733,00

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar

Rp1.714.455.733,00 dan Rp 1.580.702.154,00. Realisasi belanja barang Tahun 2023 (Audited) mengalami kenaikan sebesar 8,46% persen dari realisasi belanja barang 31 Desember 2022. Kenaikan tersebut disebabkan karena penyebaran pandemic covid 19 di tahun 2022 sudah semakin melandai dan aktifitas perkantoran juga sudah semakin pulih sehingga kebutuhan terhadap sarana dan prasarana penunjang aktifitas perkantoran juga semakin meningkat.

Rincian Belanja Barang **Tahun 2023 (Audited) dan 31 Desember 2022** dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023 (Unaudited)	Tahun 2022 (Audited)	Naik/(Turun)	%
Belanja Barang Operasional	786.524.456	773.847.188	12.677.268	2%
Belanja Barang Non Operasional	25.786.184	9.577.500	16.208.684	63%
Belanja Barang Persediaan	77.479.817	90.126.517	-12.646.700	-16%
Belanja Jasa	135.193.092	134.669.495	523.597	0%
Belanja Pemeliharaan	405.062.809	339.860.902	65.201.907	16%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	284.409.375	232.620.552	51.788.823	18%
<b>Jumlah</b>	<b>1.714.455.733</b>	<b>1.580.702.154</b>	<b>133.753.579</b>	<b>8%</b>

### **Belanja Modal**

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual. Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp63.127.943,00 dan Rp0,00. Realisasi belanja modal Tahun 2023 (Audited) mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2022, hal ini disebabkan karena Tahun 2023 satker KPKNL Kisaran merealisasikan belanja modal sedangkan pada tahun 2022 tidak ada pagu maupun realisasi belanja modal.

Rincian Belanja Modal **Tahun 2023 (Audited) dan 31 Desember 2022** dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

*Belanja Modal*  
*Rp63.127.943,00*

Uraian	Tahun 2023 (Unaudited)	Tahun 2022 (Audited)	Naik/(Turun)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.127.943	-	63.127.943	0%
Total Pengembalian Belanja Modal	-	-	0,00	0,00
<b>Total Belanja Modal Netto</b>	<b>63.127.943</b>	<b>-</b>	<b>63.127.943</b>	<b>0,00</b>

### B.6 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal  
Tanah Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2023 (Audited) dan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada table berikut :

URAIAN JENIS BELANJA	Tahun 2023 (Audited)	Tahun 2022 (Audited)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### B.7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal  
Peralatan dan  
Mesin  
Rp63.127.943,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp63.127.943,00 dan Rp0,-.

Uraian	Tahun 2023 (Unaudited)	Tahun 2022 (Audited)	Naik/(Turun)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.127.943	-	63.127.943	0%
Total Pengembalian Belanja Modal	-	-	0,00	0,00
<b>Total Belanja Modal Netto</b>	<b>63.127.943</b>	<b>-</b>	<b>63.127.943</b>	<b>0,00</b>

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 (Audited) mengalami kenaikan dibandingkan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2022. Kenaikan tersebut disebabkan karena Tahun 2023 satker KPKNL Kisaran merealisasikan belanja modal sedangkan pada tahun 2022 tidak ada pagu maupun realisasi belanja modal.

**B.8 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Belanja Modal  
Gedung dan  
Bangunan Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00.

Perbandingan realiasi belanja modal gedung dan bangunan Tahun 2023 (Audited) dibandingkan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

URAIAN JENIS BELANJA	Tahun 2023 (Audited)	Tahun 2022 (Audited)	Naik (Turun) %
- Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
- Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
- Upah tenaga kerja dan honor pengelola gedung dan bangunan	-	-	0,00
- Perjalanan gedung dan bangunan	-	-	0,00
- Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	-	0,00
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**B.9 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Belanja Modal  
Jalan, Irigasi dan  
Jaringan Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00.

Perbandingan realiasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2023 (Audited) dibandingkan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

URAIAN JENIS BELANJA	Tahun 2023 (Audited)	Tahun 2022 (Audited)	Naik (Turun) %
- Irigasi	0	0	0,00
- Jaringan	0	0	0,00
- Penambahan nilai jaringan	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**B.10 Belanja Modal Lainnya**

Belanja Modal  
Lainnya Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Perbandingan realiasi belanja modal lainnya Tahun 2023 (Audited) dibandingkan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

URAIAN JENIS BELANJA	Tahun 2023 (Audited)	Tahun 2022 (Audited)	Naik (Turun) %
Modal lainnya	0	0	0,0
Penambahan nilai aset tetap lainnya	0	0	0
			0,0
			0
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	-	0,00
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

#### Aset Lancar

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Nilai Aset Lancar KPKNL Kisaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp225.908.101,00 dan Rp36.030.839,00.

Rincian Aset Lancar pada KPKNL Kisaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	4.155.084,00	42.000,00	4.113.084,00
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	205.721.729,00	25.570.907,00	180.150.822,00
6	Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	0,00	0,00	0,00
7	Uang Muka Belanja (Prepayment)	0,00	0,00	0,00
8	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0,00	4.727.144,00	(4.727.144,00)
9	Piutang Bukan Pajak (Netto)	0,00	0,00	0,00
10	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	,00	0,00	0,00
11	Piutang dari kegiatan Operasional BLU (Netto)	0,00	0,00	0,00
12	Persediaan	16.031.288,00	5.690.788,00	10.340.500,00

13	Persediaan yang belum deregister	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>225.908.101,00</b>	<b>36.030.839,00</b>	<b>189.877.262,00</b>

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara  
Pengeluaran Rp0,00*

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan atau Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran KPKNL Kisaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022
Saldo Rekening	-	-
Uang Tunai	-	-
Kuitansi belum dipertanggungjawabkan	-	-
	-	-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran atau saldo UP/TUP Tahun 2023 (Audited) masih dipergunakan sebagai uang persediaan untuk pelaksanaan operasional rutin perkantoran KPKNL Kisaran.

### C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di Bendahara  
Penerimaan  
Rp4.155.084,00*

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp4.155.084,00 dan Rp42.000,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak .

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan dapat dilihat pada lampiran Kertas Kerja Bendahara Penerimaan.

### C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan  
Setara Kas  
Rp205.721.729,00

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan dana selain Uang Persediaan (UP/TUP) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran di lingkungan KPKNL Kisaran berupa dana pihak ketiga yang dikelola oleh Bendahara

Penerimaan/Pengeluaran serta pajak pajak yang sudah dipungut oleh bendahara penerimaan/pengeluaran namun belum disetorkan ke kas Negara serta kas lainnya di BLU.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp205.721.729,00 dan Rp25.570.907,00 yang merupakan kas berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

### C.8 Pendapatan yang masih Harus Diterima

Pendapatan yang  
Masih Harus Diterima  
Rp0,00

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya.

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp4.727.144,00. Nilai Pendapatan yang Masih Harus Diterima KPKNL Kisaran terdiri atas kinerja lelang Pejabat Lelang Kelas I yang telah dilaksanakan pada periode Tahun 2023 (Audited) namun sampai dengan akhir periode laporan pemenang lelang belum melunasi nilai pokok lelangnya sehingga bea lelang PL I nya belum disetor ke rekening kas negara, dihitung berdasarkan nilai penetapan bea lelang oleh Pejabat Lelang Kelas I yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan.

### C.15. Persediaan

Persediaan  
Rp16.031.288,00

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp16.031.288,00 dan Rp5.690.788,00, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Barang Konsumsi	16.031.288,00	5.690.788,00
Bahan untuk Pemeliharaan	0,00	0,00
Suku Cadang	0,00	0,00
Pita Cukai Materai dan Leges	0,00	0,00
ATL untuk diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00
Bahan Baku	0,00	0,00
Persediaan Lainnya	0,00	0,00

<b>Jumlah</b>	<b>16.031.288,00</b>	<b>5.690.788,00</b>
---------------	----------------------	---------------------

Keterangan :

- Persediaan senilai Rp0,00 dalam kondisi rusak;
- Persediaan senilai Rp0,00 dalam kondisi usang.

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

### Aset Tetap

Saldo aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji sebesar Rp14.367.641.082,00 dan Rp14.631.737.452,00.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset tetap pada KPKNL Kisaran berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis	Tahun 2023 (Audited)	Tahun 2022 (Audited)
1	Tanah	7.066.601.000,00	7.066.601.000,00
2	Peralatan dan Mesin	3.774.601.588,00	3.761.880.672,00
3	Gedung dan Bangunan	7.483.185.960,00	7.483.185.960,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	9.969.500,00	9.969.500,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
7	Aset Tetap yang Belum Diregister	0,00	0
Jumlah Aset Tetap		18.334.358.048,00	18.321.637.132,00
Akumulasi Penyusutan		(3.966.716.966,00)	(3.689.899.680,00)
Nilai Buku Aset Tetap		14.367.641.082,00	14.631.737.452,00

### C.19 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki KPKNL Kisaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7.066.601.000,00 dan Rp7.066.601.000,00.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tidak terdapat mutasi tambah/kurang pada aset berupa tanah.

Sampai dengan Tahun 2023 (Audited) tidak ada realisasi belanja modal tanah dan mutasi aset yang berasal dari pembelian/pengembangan langsung.

Rincian saldo tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tanah  
Rp7.066.601.000,00

No	Alamat Lokasi Tanah	Luas (m2)	Nilai
1	Jl. Prof. Moh. Yamin, SH No. 47, Kisaran Naga, Kisaran Timur, Kisaran	2368	7.066.601.000

Pada tanggal pelaporan semua tanah tersebut dikuasai dan digunakan oleh KPKNL Kisaran.

### C.20 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan Mesin  
Rp3.774.601.588,00*

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin KPKNL Kisaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah Rp3.774.601.588,00 dan Rp3.761.880.672,00. Sedangkan nilai buku Aset Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp813.818.259,00. Realisasi belanja modal Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2023 (Audited) sebesar Rp63.127.943,00 dan nilai mutasi aset/BMN dari pembelian & pengembangan nilai aset/BMN peralatan dan mesin sebesar Rp63.127.943,00, sehingga tidak terdapat selisih antara realisasi belanja dan mutasi aset tetap nya.

### C.21 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan Bangunan Rp  
7.483.185.960,00*

Nilai Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp7.483.185.960,00 dan Rp7.483.185.960,00. Sedangkan nilai buku Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp7.483.185.960,00 dan Rp7.483.185.960,00.

Rincian mutasi gedung dan bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>7.483.185.960</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
107 Reklasifikasi Masuk	0
<b>Mutasi Kurang</b>	
264 Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
304 Reklasifikasi keluar	0
<b>Saldo Per 31 Desember 2023 (Unaudited)</b>	<b>7.483.185.960</b>

Tidak terdapat mutasi tambah/kurang pada aset berupa gedung dan bangunan.

Sampai dengan Tahun 2023 (Audited) tidak ada realisasi belanja modal

gedung dan bangunan dan mutasi aset yang berasal dari pembelian/pengembangan langsung.

### C.23 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

*Aset Tetap Lainnya*  
*Rp9.969.500,00*

Saldo Aset Tetap Lainnya pada KPKNL Kisaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp 9,969,500 (sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 9,969,500 (sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), mutasi tambah sebesar Rp0,-(nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp0,- (nol rupiah).

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Bahan Perpustakaan Tercetak Saldo Bahan Perpustakaan Tercetak pada KPKNL Kisaran per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 9,969,500 (sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 52 (lima puluh dua) unit dengan nilai sebesar Rp 9,969,500 (sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) mutasi tambah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah). Dari jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah).

Tidak terdapat mutasi tambah/kurang pada aset berupa aset tetap lainnya. Sampai dengan Tahun 2023 (Audited) tidak ada realisasi belanja modal lainnya dan mutasi aset yang berasal dari pembelian/pengembangan langsung.

### C.25 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp(4.252.204.266,00) dan Rp(3.689.899.680,00).

*Akumulasi*  
*Penyusutan Aset*  
*Tetap*  
*Rp(4.252.204.266,00)*

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Berikut disajikan rincian akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember

2023 adalah sebagai berikut :

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	7.066.601.000,00	0	7.066.601.000,00
2	Peralatan & Mesin	3.774.601.588,00	(2.960.783.329,00)	813.818.259,00
3	Gedung & Bangunan	7.483.185.960,00	(1.005.933.637,00)	5.826.455.375,00
4	Jalan, Irigasi & Jaringan	0,00	0,00	0,00
5	Aset Lain-Lain	285.487.300,00	(285.487.300,00)	0
6	Aset Tetap Lainnya	9.969.500,00	0	9.969.500,00
7	Aset Tetap yang belum Diregister	0,00	0	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>46.329.962.167,00</b>	<b>(4.252.204.266,00)</b>	<b>14.367.641.082,00</b>

### Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek  
Rp222.659.503,00

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan membayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Nilai Kewajiban Jangka Pendek KPKNL Kisaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp222.659.503,00 dan Rp39.231.265,00, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Kewajiban Jangka Pendek	Tahun 2023 (Audited)	Tahun 2022 (Audited)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	216.184.503,00	35.384.237,00
2	Utang yang Belum Ditagihkan	0,00	0,00
3	Hibah yang belum disahkan	0,00	0,00
4	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	0,00	0,00
5	Pendapatan Diterima Dimuka	6.475.000,00	3.847.028,00
6	Uang Muka dari KPPN	0,00	0,00
7	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>222.659.503,00</b>	<b>39.231.265,00</b>

### C.33. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga  
Rp216.184.503,00

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp216.184.503,00 dan Rp35.384.237,00.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Adapun Rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada KPKNL Kisaran per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
1	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	10.462.774,00
2	Dana Pihak Ketiga	205.721.729,00
Jumlah		216.184.503,00

### C.38. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Uang muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Uang Muka dari  
KPPN Rp0,00*

### C.39. Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Utang Jangka Pendek  
Lainnya Rp0,00*

### C.41. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp14.370.889.680,00 dan Rp14.628.537.026,00.

Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Ekuitas  
Rp14.370.889.680,00*

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### Surplus (Defisit) Laporan Operasional

Merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa. Surplus/defisit untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp495.083.083,00 dan surplus Rp4.786.837.502,00.

#### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB  
Rp2.641.313.014,00

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.641.313.014,00 dan Rp2.972.651.875,00. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Uraian	Tahun 2023 (Unaudited)	Tahun 2022 (Audited)	Naik/(Turun) %
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	2.641.313.014	2.972.651.875	-11%
Jumlah	2.641.313.014	2.972.651.875	-11%

#### D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai  
Rp0,00

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2023 (Audited) dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Mulai 1 Agustus 2020 pembayaran gaji pegawai KPKNL Kisaran sudah dipindahkan terpusat di Kantor Pusat DJKN dan terhitung mulai 1 Juli 2022 pembayaran gaji dipusatkan pada satker Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, sehingga pada satker KPKNL Kisaran tidak ada pagu maupun realisasi pembayaran untuk periode laporan ini sehingga pada laporan keuangan ini tidak terdapat beban belanja pegawai.

#### D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan  
Rp67.139.317,00

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2023 (Audited) dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp67.139.317,00 dan

Rp86.468.667,00.

Akun	Uraian	Jumlah
593111	Beban Persediaan konsumsi	67.139.317,00
<b>JUMLAH</b>		<b>67.139.317,00</b>

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi/pemakaian atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

#### D.4 Beban Barang & Jasa

Beban Barang & Jasa  
Rp948.153.176,00

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2023 (Audited) dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp948.153.176,00 dan Rp918.087.215,00.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/ atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 (Audited) dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Akun	Uraian Jenis Beban	Tahun 2023 (Unaudited)	Tahun 2022 (Audited)	Naik/(Turun) %
521111	Beban Keperluan Perkantoran	549.734.933	512.135.822	7%
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	18.183.360	-	0%
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9.054.400	6.581.950	38%
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	146.490.000	139.580.000	5%
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	63.340.263	63.051.300	0%
521211	Beban Bahan	22.146.184	6.817.500	225%
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	3.640.000	2.760.000	32%
522111	Beban Langganan Listrik	121.930.015	104.882.396	16%
522112	Beban Langganan Telepon	13.514.021	13.601.131	-1%
522191	Beban Jasa Lainnya	120.000	-	0%
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	52.498.116	0%
522141	Beban Sewa	-	9.200.000	0%
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	6.979.000	0%
<b>JUMLAH</b>		<b>948.153.176</b>	<b>918.087.215</b>	<b>3%</b>

#### D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan  
Rp405.062.809,00

Beban Pemeliharaan pada Tahun 2023 (Audited) dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp405.062.809,00 dan Rp339.860.902,00.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023 (Audited) dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Akun	Uraian Jenis Beban	Tahun 2023 (Unaudited)	Tahun 2022 (Audited)	Naik/(Turun) %
523111	Beban Pemeliharaan	284.072.982	171.008.335	66%
523121	Beban Pemeliharaan	120.989.827	168.852.567	-28%
<b>JUMLAH</b>		<b>405.062.809</b>	<b>339.860.902</b>	<b>19%</b>

#### D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2023 (Audited) dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp284.409.375,00 dan Rp232.620.552,00.

Beban Perjalanan  
Dinas  
Rp284.409.375,00

Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 (Audited) dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Akun	Uraian Jenis Beban	Tahun 2023 (Unaudited)	Tahun 2022 (Audited)	Naik/(Turun) %
524111	Beban Perjalanan Dinas Luar Kota	266.609.375	216.070.552	23%
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam	17.800.000	16.550.000	8%
<b>JUMLAH</b>		<b>284.409.375</b>	<b>232.620.552</b>	<b>22%</b>

#### D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 (Audited) dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp541.778.254,00 dan Rp536.109.920,00.

Beban Penyusutan  
dan Amortisasi  
Rp541.778.254,00

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Laporan Keuangan KPKNL Kisaran Tahun 2023

Akun	Uraian Jenis Beban	Tahun 2023 (Unaudited)	Tahun 2022 (Audited)	Naik/(Turun) %
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	369.486.719	363.818.386	2%
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	172.291.535	172.291.534	0%
<b>JUMLAH</b>		<b>541.778.254</b>	<b>536.109.920</b>	<b>1%</b>

### D.10 Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Rp100.313.000,00

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 (Audited) dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2023 (Audited)	Tahun 2022 (Audited)	Naik (Turun) %
Surplus Penjualan Aset Non Lancar			
Penjualan peralatan dan mesin	100.313.000	-	-
Tukar menukar peralatan dan mesin	-	-	-
Pemindahtanganan BMN lainnya	-	-	-
Beban pelepasan aset non lancar	-	-	-
Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional	-	-	-
Pendapatan selisih kurs terealisasi - BLU	-	-	-
Penerimaan kembali belanja barang BLU TAYL	-	-	-
Pendapatan penyelesaian TGR	-	-	-
Pendapatan penyelesaian TP	-	-	-
Penerimaan kembali B.Peg TAYL	-	-	-
Penerimaan kembali B.Brg TAYL	-	-	-
Penerimaan kembali B.Mdl TAYL	-	-	-
Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi BLU	-	-	-
Pendapatan Perolehan aset lainnya	-	-	-
Pendapatan penyesuaian nilai persediaan	-	-	-
Beban dari kegiatan non operasional lainnya	-	-	-
Defisit Selisih Kurs			
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>100.313.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa  
Rp0,00

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2023 (Audited) dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

URAIAN	Tahun 2023 (Audited)	Tahun 2022 (Audited)	Naik (Turun) %
Pendapatan PNBPN	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah. Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp14.370.889.680,00 dan Rp14.628.537.026,00, terdiri dari :

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	14.628.537.026,	15.083.657.995,	(455.120.969,)	-3%
SURPLUS/DEFISIT-LO	495.083.083,	862.284.619,	(367.201.536,)	-43%
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	2.444.445,	387.981,	2.056.464,	530%
PENYESUAIAN NILAI ASET	0,	0,	0,	0%
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0,	0,	0,	0%
SELISIH REVALUASI ASET	0,	0,	0,	0%
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0,	387.981,	(387.981,)	0%
LAIN-LAIN	2.444.445,	0,	2.444.445,	0%
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(755.174.874,)	(1.317.793.569,)	562.618.695,	-43%
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(257.647.346,)	(455.120.969,)	197.473.623,	-43%
EKUITAS AKHIR	14.370.889.680,	14.628.537.026,	(257.647.346,)	-2%

**E.1 Ekuitas Awal**

Ekuitas Awal  
Rp14.628.537.026,00

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 dan 1 Januari 2022 adalah masing-masing sebesar Rp14.628.537.026,00 dan Rp15.083.657.995,00.

**E.2 Surplus (Defisit) LO**

Surplus/Defisit LO  
Rp495.083.083,00

Jumlah Surplus/defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar surplus Rp495.083.083,00 dan surplus Rp862.284.619,00.

Surplus/Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan keladian luar biasa.

### E.3 Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar entitas Rp(755.174.874,00)

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp(755.174.874,00) dan Rp(1.317.793.569,00).

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Akun	Uraian	2023	2022
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	1.777.583.676,	1.580.702.154,
313121	Diterima dari Entitas Lain	-2.747.312.491,	-2.977.003.848,
313221	Transfer Masuk	214.553.941,	78.508.125,
<b>JUMLAH</b>		<b>-755.174.874,</b>	<b>-1.317.793.569,</b>

- Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)  
Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar (Rp2.747.312.491,00) sedangkan DKEL sebesar Rp1.777.583.676,00.
- Transfer Masuk/Transfer Keluar  
Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp214.553.941,00.

Kenaikan/penurunan Ekuitas Rp237.453.737,00

### E.10 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan/penurunan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp237.453.737,00 dan Rp563.672.561,00.

Akun	Uraian	2023	2022
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	1.777.583.676,	1.580.702.154
313121	Diterima dari Entitas Lain	-2.747.312.491,	2.977.003.848
313221	Transfer Masuk	214.553.941,	78.508.125,

## Laporan Keuangan KPKNL Kisaran Tahun 2023

391119	Koreksi Lainnya	2.444.445,	0,
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	100.313.000,	2.780.000,
425129	Pengembalian Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	100.313.000,	2.780.000,
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.607.583,	4.429.972,
425131	Pengembalian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.607.583,	4.429.972,
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	501.989,	0,
425699	Pengembalian Pendapatan Jasa Lainnya	501.989,	0,
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	1.623.821.727,	2.273.470.142,
425782	Pengembalian Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	1.623.821.727,	2.273.470.142,
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1.011.788.930,	693.916.638,
425784	Pengembalian Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1.011.788.930,	693.916.638,
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	1.207.770,	793.123,
425785	Pengembalian Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang	1.207.770,	793.123,
425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak	385.015,	0,
425995	Pengembalian Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang	385.015,	0,
593111	Beban Persediaan konsumsi	-67.139.317,	-86.468.667,
593111	Pengembalian Beban Persediaan konsumsi	-67.139.317,	-86.468.667,
521111	Beban Keperluan Perkantoran	-549.734.933,	-512.135.822,
521111	Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	-549.734.933,	-512.135.822,
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-18.183.360,	0,
521113	Pengembalian Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-18.183.360,	0,
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	-9.054.400,	-6.581.950,
521114	Pengembalian Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	-9.054.400,	-6.581.950,
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	-146.490.000,	-139.580.000,
521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	-146.490.000,	-139.580.000,
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	-63.340.263,	-63.051.300,
521119	Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	-63.340.263,	-63.051.300,
521211	Beban Bahan	-22.146.184,	-6.817.500,
521211	Pengembalian Beban Bahan	-22.146.184,	-6.817.500,
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	-3.640.000,	-2.760.000,
521219	Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	-3.640.000,	-2.760.000,
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-369.486.719,	-363.818.386,
591111	Pengembalian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-369.486.719,	-363.818.386,
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-172.291.535,	-172.291.534,
591211	Pengembalian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-172.291.535,	-172.291.534,
522111	Beban Langganan Listrik	-121.930.015,	-96.203.493,
522111	Pengembalian Beban Langganan Listrik	-121.930.015,	-96.203.493,
522112	Beban Langganan Telepon	-13.514.021,	-12.466.704,

Laporan Keuangan KPKNL Kisaran Tahun 2023

522112	Pengembalian Beban Langganan Telepon	-13.514.021,	-12.466.704,
522191	Beban Jasa Lainnya	-120.000,	0,
522191	Pengembalian Beban Jasa Lainnya	-120.000,	0,
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-284.072.982,	-171.008.335,
523111	Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-284.072.982,	-171.008.335,
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-120.989.827,	-168.852.567,
523121	Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-120.989.827,	-168.852.567,
524111	Beban Perjalanan Biasa	-266.609.375,	-216.070.552,
524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	-266.609.375,	-216.070.552,
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-17.800.000,	-16.550.000,
524113	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-17.800.000,	-16.550.000,
<b>JUMLAH</b>		237.435.737	563.672.561

*Ekuitas Akhir*

*Rp14.370.889.680,00*

**Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp14.370.889.680,00 dan Rp14.628.537.026,00.

## F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

### F.1. REKENING PEMERINTAH

Daftar informasi rekening pemerintah disajikan sebagaimana dalam lampiran.

### F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

#### ➤ Capaian Kinerja/Output

Capaian kinerja/output 31 Desember 2023 sudah tercapai 100,00 persen bahkan ada yang melampaui target output yang telah ditetapkan sebelumnya, capaian kinerja/output tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut.

Uraian Output	Belanja			Output			
	Pagu	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
<b>A. Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko</b>							
Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	1.182.000	876.000	74,11	25	orang	80	320,00
Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang	1.225.000	720.000	58,78	25	orang	150	600,00
Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	28.012.000	27.037.000	96,52	50	surat keputusan	91	182,00
Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	15.688.000	12.412.000	79,12	8	surat keputusan	12	150,00
Risalah Lelang	13.608.000	7.437.000	54,65	350	Laporan	632	180,57
Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU)	40.000.000	34.518.100	86,30	20	Laporan	24	120,00
Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	11.416.000	8.440.000	73,93	30	Rekomendasi	37	123,33
Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	20.972.000	17.854.000	85,13	171	Rekomendasi	171	100,00
Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	7.920.000	6.658.000	84,07	1	Rekomendasi	1	100,00
Rekomendasi Hasil Penilaian	8.702.000	8.702.000	100,00	1	Rekomendasi	1	100,00
Penggalan Potensi Lelang	60.000.000	53.404.960	89,01	1	Rekomendasi	43	4300,00
Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	27.296.000	22.335.428	81,83	161	Rekomendasi	290	180,12
Pengelolaan Aset EUN	11.176.000	5.000.000	44,74	2	Unit	2	100
<b>B. Program Dukungan Manajemen</b>							
Layanan Bantuan Hukum	12.053.000	10.584.560	87,82	20	Layanan	20	100
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	12.000.000	11.950.005	99,58	1	Unit	1	100
Kerumahtanggaan	85.340.000	82.611.511	96,80	12	Layanan	12	100
Layanan Perkantoran	1.480.536.000	1.404.260.174	94,85	12	Layanan	12	100
Peralatan Fasilitas Perkantoran	51.178.000	51.177.938	100,00	10	Unit	10	100
Kehumasan	7.634.000	2.938.000	38,49	5	Kegiatan	26	520
Rekomendasi Kepatuhan Internal	10.736.000	8.667.000	80,73	5	Rekomendasi	5	100

#### ➤ Nilai IKPA, SMART DJA dan PKPA

Nilai capaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) cukup baik yaitu 95,78%, nilai capaian SMART DJA dan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) masing-masing mencapai 97,68% dan 93,68%.

Nilai capaian IKPA, SMART DJA dan PKPA dapat dilihat pada tabel berikut.

INDIKATOR IKU	NILAI	BOBOT	NILAI AKHIR
<b>A) NILAI IKPA (Bobot 50%)</b>			<b>97,68</b>
1. Revisi DIPA	100	10	10
2. Deviasi Halaman III DIPA	91,19	10	9,12
3. Penyerapan Anggaran	99,83	20	19,97
4. Belanja Kontraktual	100	10	10
5. Penyelesaian Tagihan	100	10	10
6. Pengelolaan UP dan TUP	85,99	10	8,6
7. Dispensasi SPM	100	5	5
8. Capaian Output	100	25	25
<b>B) NILAI SMART (Bobot 50%)</b>			<b>93,68</b>
1. Capaian Output	100	43,50%	43,5
2. Efisiensi	81,8	28,60%	23,3948
3. Konsistensi RPD	99,17	18,20%	18,04894
4. Penyerapan Anggaran	93,23	9,70%	9,04331
<b>Nilai Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran s.d. TW IV</b>			<b>95,68</b>
<b>Realisasi IKU IKKPA Triwulan IV</b>			<b>101,44</b>

# LAMPIRAN



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 506081  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	1,906,674,000	1,906,674,000	0
2	Belanja	1,777,583,676	1,777,583,676	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	1,540,241,000	1,540,241,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	2,747,312,491	2,747,312,491	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 26-JAN-24*



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN**

**Bulan: Desember 2023**

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Tgl. No. SP : 30 November 2022 , DIPA-015.09.2.506081/2023

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Tahun : 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota : (07.10) SUMATERA UTARA / KAB. ASAHAN

KPPN : (076) Tanjung Balai Asahan

Satuan Kerja : (506081) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN

Alamat dan No Telp : Jl. Prof. H.M. Yamin, S.H. No.47, Kisaran , 062341860

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00075/KWTI/506081/2023

1	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>BP Kas, BPP dan UM</b>	20.742.174,00	180.654.465,00	201.396.639,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	20.742.174,00	180.654.465,00	201.396.639,00	0,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>BP Selain Kas</b>	20.742.174,00	142.141.931,00	162.884.105,00	0,00
	1. BP UP*)	20.742.174,00	44.964.726,00	65.706.900,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	58.677.205,00	58.677.205,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

\*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

\*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00	(terlampir salinan rekening koran)
<b>3. Jumlah Kas</b>	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	0,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0,00
<b>3. Selisih Kas</b>	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	0,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

- 1.
- 2.

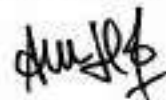
Mengetahui  
Kuasa Pengguna Anggaran



AGUS BUDIANTA  
NIP. 197608031999031002

KAB. ASAHAN, 31 Desember 2023

Bendahara Pengeluaran



ADELIA T.R. HUTAPEA

NIP 199908242022012001



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**SUMATERA UTARA**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN**  
JALAN PROF. H. M. YAMIN S.H. NO. 47 KODE POS 21219 TELEPON (0623) 41660 FAKSIMILE 0623- 42520

NOTA DINAS  
NOMOR ND-15/KNL.0203/2024

Yth. : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Tanjung Balai  
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kisaran  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Penyampaian Laporan Saldo Rekening yang Dikelola Bendahara  
Pengeluaran KPKNL Kisaran Periode Desember 2023  
Tanggal : 4 Januari 2024

Menindaklanjuti ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga, bersama ini kami sampaikan Laporan Saldo Rekening yang Dikelola Bendahara Pengeluaran KPKNL Kisaran Periode Desember 2023.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik  
Agus Budianta



LAPORAN SALDO REKENING BENDAHARA PENGELUARAN  
KPKNL KISARAN  
PER 31 DESEMBER 2023

No	Satuan Kerja			Rekening			Bank			Kode Rekening	Persetujuan Rekening		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo Akhir	Keterangan
	BA	Es.1	Kode	Nomor	Nama	Kode Jenis	Kode	Nama	Cabang		Nomor	Tanggal			
Telah Menjadi Hak Negara															
1	015	09	50001	993014500011000	EPG DTE KPKNL KISARAN	200	009	Bank Negara Indonesia	Pecanongan	30	S-190/WPB.12/KPO-3/2020	15 Februari 2020	29 Desember 2023	Rp0	
2	015	09	50001	076500011	RPL DTE KPKNL KISARAN LTK PS TKPKN	380	009	Bank Negara Indonesia	Tanjungbala Asahan	30	S-1230/MH.5/2017	31 Januari 2017	7 Juni 2023	Rp0	
Jumlah														Rp0	
Belum Tidak Menjadi Hak Negara															

Kepala KPKNL Kisanan



Agus Budiarta  
197608031990031000



## Account Information

### BALANCE INQUIRY

Thursday 04 January 2024

Date	04/01/2024 5:10 PM		
Company	KPKNL KISARAN		
Nama Cabang	0989-PECENONGAN		
Account Type	Virtual		
Account No./Account Name	Currency	Limit Balance	Remark
9890145060811000 / BPG 076 KPKNL Kisaran	IDR	0.00	
	<i>IDR</i>	<i>Total</i>	<i>0.00</i>



## Account Information

### BALANCE INQUIRY

Thursday 04 January 2024

Date	04/01/2024 5:10 PM				
Company	KPKNL KISARAN				
Nama Cabang	0064-TANJUNG BALAI ASAHAN				
Account Type	Current				
Account No./Account Name	Currency	Effective Balance	Ending Balance	Remark	
765060811 / RPL 076 KPKNL KISARAN UTK PS TKPKN	IDR	0.00	0.00		
	<i>IDR</i>	<i>Total</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN**

**Bulan: Desember 2023**

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
 Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA  
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (07.10) SUMATERA UTARA / KAB. ASAHAN  
 Satuan Kerja : (506081) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN  
 Tgl. No. SP DIPA : 30 November 2022 , DIPA-015.09.2.506081/2023  
 Tahun Anggaran : 2023  
 KPPN : (076) Tanjung Balai Asahan  
 Alamat dan No Telp : Jl. Prof. H.M. Yamin, S.H. No.47, Kisaran , 062341660.

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 209.876.813,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00120/SSPDT/506081/2023

1	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
2	3	4	5	6	
A.	BP Kas	658.066.889,00	5.786.018.802,00	6.234.208.878,00	209.876.813,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	658.066.889,00	5.786.018.802,00	6.234.208.878,00	209.876.813,00
B.	BP Selain Kas	658.066.889,00	5.786.018.802,00	6.234.208.878,00	209.876.813,00
	1. BP PNBP	0,00	133.324.984,00	133.324.984,00	0,00
	2. BP DPK	658.066.889,00	5.560.881.318,00	6.035.071.394,00	209.876.813,00
	3. BP Pajak	0,00	65.812.500,00	65.812.500,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2. Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	209.876.813,00
3. Jumlah Kas	Rp	209.876.813,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	209.876.813,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp	209.876.813,00
3. Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1. Saldo Awal	Rp	0,00
2. Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	199.137.484,00
3. Jumlah Penerimaan Negara	Rp	199.137.484,00
4. Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	199.137.484,00
Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	133.324.984,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti selor)	Rp	325.157.780,00
<hr/>		
3. Selisih	Rp	- 191.832.796,00

Vi. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1-II.3) :
2. Selisih Pembukuan (III.C) : Terdapat penerimaan negara yang tidak melalui rekening bendahara penerimaan sebesar Rp191.832.796

Mengetahui

Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan  
Penerimaan Negara

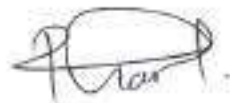


GARRY FISCHER SILITONGA

NIP 198708142015021005

KAB. ASAHAN , 09 Januari 2024

Bendahara Penerimaan



RIZKI HARNI MANURUNG

199706282018012001 199706282018012001

**Hasil Pemeriksaan Kas**

Periode Desember 2023

Kaadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 209.876.813,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00120/SSPOT/506061/2023

**I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan**

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	209.876.813
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNSP	Rp.	0
2. BP DPK	Rp.	209.876.813
3. BP Pajak	Rp.	0
4. BP Lainnya	Rp.	0
5. Jumlah	Rp.	209.876.813
C. Selisih Pembukuan (A-B5)	Rp.	0

**II. Hasil Pemeriksaan Kas**

A. Kas yang dikuasai bendahara		
1. Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
2. Uang di Rekening Bendahara	Rp.	209.876.813
3. Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	209.876.813
B. Selisih Kas (II.A.3)	Rp.	0

**III. Hasil Rekonsiliasi Internal**

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	133.324.984
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	133.324.984
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	326.157.780
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	-191.832.796

**IV. Penjelasan atas selisih**

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Terdapat penerimaan negara yang tidak melalui rekening bendahara penerimaan sebesar Rp191.832.796

Bendahara Penerimaan



RIZKI HARNI MANURUNG

199706262018012001 199706262018012001

Mengetahui

Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan  
Negara


GARRY FISCHER SILTONGA

NIP. 198708142015021005

**LAPORAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN  
KPKNL KISARAN  
Per 31 Desember 2023**

No.	Satuan Kerja			Rekening			Bank			Kode Rekening	Persetujuan Rekening		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo Akhir	Keterangan
	BA	Es.1	Kode	Nomor	Nama	Kode Jenis	Kode	Nama	Cabang		Nomor	Tanggal			
<b>Telah Menjadi Hak Negara</b>															
1	015	09	506081	63601001890302	RPL 076 KPKNL KISARAN UTK PDJ LELANG	-	-	Bank Rakyat Indonesia	Perdagangan	10	000113/076	03 Agustus 2023	29 Desember 2023	Rp0	
2	015	09	506081	63601001900307	RPL 076 KPKNL KISARAN UTK PDJ PIUTANG	-	-	Bank Rakyat Indonesia	Perdagangan	10	000114/076	03 Agustus 2023	21 Desember 2023	Rp0	
<b>Belum/Tidak Menjadi Hak Negara</b>															
1	015	09	506081	63601001890302	RPL 076 KPKNL KISARAN UTK PDJ LELANG	-	-	Bank Rakyat Indonesia	Perdagangan	10	000113/076	03 Agustus 2023	24 Desember 2023	Rp208.865.911	
2	015	09	506081	63601001900307	RPL 076 KPKNL KISARAN UTK PDJ PIUTANG	-	-	Bank Rakyat Indonesia	Perdagangan	10	000114/076	03 Agustus 2023	21 Desember 2023	Rp3.010.992.40	

Kepala KPKNL Kisaran

  
Agus Budianto

# Lampiran dari Aplikasi MonSAKTI

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**  
(DALAM RUPIAH)



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**UNIT ORGANISASI : ( 09 ) DITJEN KEKAYAAN NEGARA**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 0700 ) SUMATERA UTARA**  
**SATUAN KERJA : ( 506081 ) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN**

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM  
Tgl Cetak : 13/05/24 10:08 AM  
Halaman : 1

lap\_neraca\_satker\_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas di Bendahara Penerimaan	4,155,084	42,000	4,113,084	9,793.06
Kas Lainnya dan Setara Kas	205,721,729	25,570,907	180,150,822	704.51
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	4,727,144	(4,727,144)	(100.00)
Persediaan	16,031,288	5,690,788	10,340,500	181.71
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>225,908,101</b>	<b>36,030,839</b>	<b>189,877,262</b>	<b>526.99</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	7,269,363,000	7,066,601,000	202,762,000	2.87
Peralatan dan Mesin	3,774,601,588	3,761,880,672	12,720,916	0.34
Gedung dan Bangunan	7,685,947,960	7,483,185,960	202,762,000	2.71
Aset Tetap Lainnya	9,969,500	9,969,500	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4,169,478,966)	(3,689,899,680)	(479,579,286)	13.00
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>14,570,403,082</b>	<b>14,631,737,452</b>	<b>(61,334,370)</b>	<b>(0.42)</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Lain-lain	285,487,300	0	285,487,300	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(285,487,300)	0	(285,487,300)	0.00
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>14,796,311,183</b>	<b>14,667,768,291</b>	<b>128,542,892</b>	<b>0.88</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	216,184,503	35,384,237	180,800,266	510.96
Pendapatan Diterima Dimuka	6,475,000	3,847,028	2,627,972	68.31
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>222,659,503</b>	<b>39,231,265</b>	<b>183,428,238</b>	<b>467.56</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>222,659,503</b>	<b>39,231,265</b>	<b>183,428,238</b>	<b>467.56</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	14,573,651,680	14,628,537,026	(54,885,346)	(0.38)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>14,573,651,680</b>	<b>14,628,537,026</b>	<b>(54,885,346)</b>	<b>(0.38)</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>14,573,651,680</b>	<b>14,628,537,026</b>	<b>(54,885,346)</b>	<b>(0.38)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>14,796,311,183</b>	<b>14,667,768,291</b>	<b>128,542,892</b>	<b>0.88</b>

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**UNIT ORGANISASI : ( 09 ) DITJEN KEKAYAAN NEGARA**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 0700 ) SUMATERA UTARA**  
**SATUAN KERJA : ( 506081 ) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN**  
**LELANG KISARAN**

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM  
Tgl Cetak : 13/05/24 10:08 AM  
Halaman : 2

lap\_neraca\_satker\_komparatif

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Kisaran, 13 Mei 2024  
Penanggung Jawab UAKPA  
null

MELLY MAIESTA  
197605311999032001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 015  
**ESELON I** : 09  
**WILAYAH/PROVINSI** : 002  
**SATUAN KERJA** : 506081  
**JENIS SATUAN KERJA** : KD

**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**DITJEN KEKAYAAN NEGARA**  
**SUMATERA UTARA**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 13/05/24 10:15 AM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_satker  
Tgl Data : 13/5/24 7:36 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	525,532,000	550,750,000	549,734,933	0	549,734,933	99.82	1,015,067
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	18,392,000	18,392,000	18,183,360	0	18,183,360	98.87	208,640
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,600,000	9,600,000	8,775,900	0	8,775,900	91.42	824,100
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	146,640,000	146,640,000	146,490,000	0	146,490,000	99.9	150,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	63,342,000	63,342,000	63,340,263	0	63,340,263	100	1,737
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	7,200,000	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211</b>	<b>770,706,000</b>	<b>792,324,000</b>	<b>786,524,456</b>	<b>0</b>	<b>786,524,456</b>	<b>99.27</b>	<b>5,799,544</b>
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	32,513,000	32,173,000	22,146,184	0	22,146,184	68.83	10,026,816
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	7,717,000	7,717,000	3,640,000	0	3,640,000	47.17	4,077,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212</b>	<b>40,230,000</b>	<b>39,890,000</b>	<b>25,786,184</b>	<b>0</b>	<b>25,786,184</b>	<b>64.64</b>	<b>14,103,816</b>
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	99,290,000	98,495,000	77,479,817	0	77,479,817	78.66	21,015,183
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218</b>	<b>99,290,000</b>	<b>98,495,000</b>	<b>77,479,817</b>	<b>0</b>	<b>77,479,817</b>	<b>78.66</b>	<b>21,015,183</b>
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	132,000,000	132,000,000	121,666,188	0	121,666,188	92.17	10,333,812
522112	Belanja Langganan Telepon	16,800,000	16,800,000	13,526,904	0	13,526,904	80.52	3,273,096
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	6,840,000	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221</b>	<b>155,640,000</b>	<b>148,800,000</b>	<b>135,193,092</b>	<b>0</b>	<b>135,193,092</b>	<b>90.86</b>	<b>13,606,908</b>
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	225,420,000	290,265,000	284,072,982	0	284,072,982	97.87	6,192,018
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	229,480,000	150,652,000	120,989,827	0	120,989,827	80.31	29,662,173
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231</b>	<b>454,900,000</b>	<b>440,917,000</b>	<b>405,062,809</b>	<b>0</b>	<b>405,062,809</b>	<b>91.87</b>	<b>35,854,191</b>
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	291,690,000	297,030,000	266,609,375	0	266,609,375	89.76	30,420,625
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31,040,000	26,040,000	17,800,000	0	17,800,000	68.36	8,240,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241</b>	<b>322,730,000</b>	<b>323,070,000</b>	<b>284,409,375</b>	<b>0</b>	<b>284,409,375</b>	<b>88.03</b>	<b>38,660,625</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52</b>	<b>1,843,496,000</b>	<b>1,843,496,000</b>	<b>1,714,455,733</b>	<b>0</b>	<b>1,714,455,733</b>	<b>93</b>	<b>129,040,267</b>
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63,178,000	63,178,000	63,127,943	0	63,127,943	99.92	50,057

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 015      **KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**ESELON I** : 09      **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**  
**WILAYAH/PROVINSI** : 002      **SUMATERA UTARA**  
**SATUAN KERJA** : 506081      **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN**  
**JENIS SATUAN KERJA** : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2  
 Tanggal : 13/05/24 10:15 AM  
 Halaman : 2  
 Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_satker  
 Tgl Data : 13/5/24 7:36 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	63,178,000	63,178,000	63,127,943	0	63,127,943	99.92	50,057
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	63,178,000	63,178,000	63,127,943	0	63,127,943	99.92	50,057
	JUMLAH BELANJA	1,906,674,000	1,906,674,000	1,777,583,676	0	1,777,583,676	93.23	129,090,324

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023  
(dalam rupiah)**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 015  
**ESELON I** : 09  
**WILAYAH/PROVINSI** : 0700  
**SATUAN KERJA** : 506081

**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**DITJEN KEKAYAAN NEGARA**  
**SUMATERA UTARA**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN**

Kode Lap : LRA.P.E1.1  
Tanggal : 13/05/24 10:31 AM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_akun\_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	14,000,000	0	0	0	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	7,000,000	100,313,000	0	100,313,000	1433.04
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4,000,000	8,680,000	0	8,680,000	217
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251</b>	<b>25,000,000</b>	<b>108,993,000</b>	<b>0</b>	<b>108,993,000</b>	<b>435.97</b>
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	501,989	0	501,989	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256</b>	<b>0</b>	<b>501,989</b>	<b>0</b>	<b>501,989</b>	
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	1,034,000,000	1,624,435,787	0	1,624,435,787	157.1
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	479,000,000	1,011,788,930	0	1,011,788,930	211.23
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	2,241,000	1,207,770	0	1,207,770	53.89
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257</b>	<b>1,515,241,000</b>	<b>2,637,432,487</b>	<b>0</b>	<b>2,637,432,487</b>	<b>174.06</b>
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil	0	385,015	0	385,015	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259</b>	<b>0</b>	<b>385,015</b>	<b>0</b>	<b>385,015</b>	
	<b>JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42</b>	<b>1,540,241,000</b>	<b>2,747,312,491</b>	<b>0</b>	<b>2,747,312,491</b>	<b>178.37</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1,540,241,000</b>	<b>2,747,312,491</b>	<b>0</b>	<b>2,747,312,491</b>	<b>178.37</b>



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN 015  
**ESELON I** : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09  
**SATUAN KERJA** : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN 506081

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM  
Tgl Cetak : 13/05/24 10:10 AM  
Halaman : 2  
lap\_lra\_face\_satker\_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>a. Dana Perimbangan</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1. Dana Transfer Umum</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Dana Transfer Khusus</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>b. Dana Insentif Daerah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>c. Dana Keistimewaan DIY</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>d. Dana Otonomi Khusus</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Dana Desa</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Hibah Kepada Daerah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)</b>	<b>1,906,674,000</b>	<b>1,777,583,676</b>	<b>(129,090,324)</b>	<b>93</b>	<b>1,710,010,000</b>	<b>1,580,702,154</b>	<b>(129,307,846)</b>	<b>92</b>
<b>C. PEMBIAYAAN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Kisaran, 13 Mei 2024  
Penanggung Jawab UAKPA  
null

MELLY MAIESTA  
197605311999032001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN  
UNIT ORGANISASI : ( 09 ) DITJEN KEKAYAAN NEGARA  
WILAYAH/PROVINSI : ( 0700 ) SUMATERA UTARA  
SATUAN KERJA : ( 506081 ) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN  
LELANG KISARAN

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM  
Tgl Cetak : 13/05/24 9:10 AM  
Halaman : 1  
lap\_lpe\_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	14,628,537,026	15,083,657,995	(455,120,969)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	495,083,083	862,284,619	(367,201,536)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	2,444,445	387,981	2,056,464	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	387,981	(387,981)	-
LAIN-LAIN	2,444,445	0	2,444,445	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(552,412,874)	(1,317,793,569)	765,380,695	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(54,885,346)	(455,120,969)	400,235,623	-
EKUITAS AKHIR	14,573,651,680	14,628,537,026	(54,885,346)	-

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Kisaran, 13 Mei 2024  
Penanggung Jawab UAKPA  
null

MELLY MAIESTA  
197605311999032001

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**  
(DALAM RUPIAH)



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**UNIT ORGANISASI : ( 09 ) DITJEN KEKAYAAN NEGARA**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 0700 ) SUMATERA UTARA**  
**SATUAN KERJA : ( 506081 ) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN**

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 9:09 AM

Halaman : 1

lap\_lo\_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,641,313,014	2,972,651,875	(331,338,861)	(11.146)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	2,641,313,014	2,972,651,875	(331,338,861)	(11.146)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	2,641,313,014	2,972,651,875	(331,338,861)	(11.146)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	67,139,317	86,468,667	(19,329,350)	(22.354)
Beban Barang dan Jasa	948,153,176	918,087,215	30,065,961	3.275
Beban Pemeliharaan	405,062,809	339,860,902	65,201,907	19.185
Beban Perjalanan Dinas	284,409,375	232,620,552	51,788,823	22.263
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
 PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
 (DALAM RUPIAH)



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**UNIT ORGANISASI : ( 09 ) DITJEN KEKAYAAN NEGARA**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 0700 ) SUMATERA UTARA**  
**SATUAN KERJA : ( 506081 ) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN**

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 9:09 AM

Halaman : 2

lap\_lo\_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	541,778,254	536,109,920	5,668,334	1.057
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>2,246,542,931</b>	<b>2,113,147,256</b>	<b>133,395,675</b>	<b>6.313</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>394,770,083</b>	<b>859,504,619</b>	<b>(464,734,536)</b>	<b>(54.07)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	100,313,000	2,780,000	97,533,000	3,508.381
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	100,313,000	2,780,000	97,533,000	3,508.381
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>100,313,000</b>	<b>2,780,000</b>	<b>97,533,000</b>	<b>3,508.381</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>495,083,083</b>	<b>862,284,619</b>	<b>(367,201,536)</b>	<b>(42.585)</b>
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>495,083,083</b>	<b>862,284,619</b>	<b>(367,201,536)</b>	<b>(42.585)</b>

---

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Kisaran, 13 Mei 2024  
Penanggung Jawab UAKPA  
null

MELLY MAIESTA  
197605311999032001

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : ( 09 ) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : ( 0700 ) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : ( 506081 ) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN  
LELANG KISARAN

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 10:27 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	4,155,084	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	205,721,729	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	16,031,288	0
0.0	131111	Tanah	7,269,363,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,774,601,588	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	7,685,947,960	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	9,969,500	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,960,783,329
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,208,695,637
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	285,487,300	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	285,487,300
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	10,462,774
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	205,721,729
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	6,475,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,777,583,676
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	2,747,312,491	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	417,315,941
0.0	391111	Ekuitas	0	14,628,537,026
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	2,444,445
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	100,313,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	3,607,583
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	501,989
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	1,623,821,727
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	1,011,788,930
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	1,207,770
3.0	425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	0	385,015
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	549,734,933	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	18,183,360	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,054,400	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	146,490,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	63,340,263	0
3.0	521211	Beban Bahan	22,146,184	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	3,640,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	121,930,015	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	13,514,021	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	120,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	284,072,982	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	120,989,827	0

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : ( 09 ) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : ( 0700 ) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : ( 506081 ) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN  
LELANG KISARAN

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 10:27 AM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	266,609,375	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,800,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	369,486,719	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	172,291,535	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	67,139,317	0
JUMLAH			24,245,132,871	24,245,132,871

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Kisaran, 13 Mei 2024  
Penanggung Jawab UAKPA  
nullMELLY MAIESTA  
197605311999032001

## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : ( 09 ) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : ( 0700 ) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : ( 506081 ) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN  
LELANG KISARAN

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 10:28 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	1,777,583,676
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	2,747,312,491	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	100,313,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	8,680,000
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	501,989
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	1,624,435,787
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	1,011,788,930
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	1,207,770
3.0	425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	0	385,015
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	549,734,933	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	18,183,360	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8,775,900	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	146,490,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	63,340,263	0
3.0	521211	Belanja Bahan	22,146,184	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,640,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	77,479,817	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	121,666,188	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	13,526,904	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	284,072,982	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	120,989,827	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	266,609,375	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,800,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63,127,943	0
JUMLAH			4,524,896,167	4,524,896,167

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Kisaran, 13 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

null

MELLY MAIESTA  
197605311999032001

**RINCIAN BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN MENURUT AKUN  
SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023**

*calc\_lo\_akun\_satker --rekon17*

Akun	Uraian	Jumlah
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	369,486,719
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	172,291,535



**RINCIAN BEBAN BARANG OPERASIONAL MENURUT AKUN  
SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023**

*calc\_lo\_akun\_satker --rekon17*

Akun	Uraian	Jumlah
521111	Beban Keperluan Perkantoran	549,734,933
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	18,183,360
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,054,400
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	146,490,000
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	63,340,263
521211	Beban Bahan	22,146,184
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	3,640,000
522111	Beban Langganan Listrik	121,930,015
522112	Beban Langganan Telepon	13,514,021
522191	Beban Jasa Lainnya	120,000



**RINCIAN PENDAPATAN DARI PENJUALAN, PENGELOLAAN BMN, IURAN BADAN USAHA DAN  
SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023**

*calc\_lo\_akun\_satker --rekon17*

Akun	Uraian	Jumlah
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-100,313,000



**LAPORAN BARANG PENGGUNA  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPB : 015**  
**UAKPB : 506081**

**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN**

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 11:05 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap\_bmn\_gab\_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN					KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>131111</b>	<b>Tanah</b>		<b>2,368</b>	<b>7,066,601,000</b>	<b>180</b>	<b>202,762,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,548</b>	<b>7,269,363,000</b>
2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	0	0	180	202,762,000	0	0	180	202,762,000
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	2,368	7,066,601,000	0	0	0	0	2,368	7,066,601,000
<b>132111</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>		<b>366</b>	<b>3,775,916,672</b>	<b>36</b>	<b>318,408,832</b>	<b>7</b>	<b>303,444,300</b>	<b>395</b>	<b>3,790,881,204</b>
3010304003	Stationary Generating Set	Unit	1	181,500,000	0	0	0	0	1	181,500,000
3010305010	Pompa Air	Unit	1	1,760,000	0	0	0	0	1	1,760,000
3020102003	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Unit	5	1,318,386,650	0	0	1	207,300,000	4	1,111,086,650
3020104001	Sepeda Motor	Unit	5	102,852,499	0	0	0	0	5	102,852,499
3020201009	Baggage Trolley	Unit	1	968,000	0	0	0	0	1	968,000
3020202003	Kursi Roda	Unit	0	0	1	2,099,998	0	0	1	2,099,998
3030211003	Rol Meter	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3030301046	Survey Meter (Alat Ukur Universal)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3030301131	Wheel Meter	Buah	1	822,766	0	0	0	0	1	822,766
3030301141	Distance Meter	unit	0	0	0	0	0	0	0	0
3050101003	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	1	48,621,000	0	0	0	0	1	48,621,000
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	14	56,992,000	0	0	0	0	14	56,992,000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	13	51,725,000	0	0	0	0	13	51,725,000
3050104003	Rak Besi	Buah	32	52,800,000	0	0	0	0	32	52,800,000
3050104004	Rak Kayu	Buah	11	40,370,000	0	0	0	0	11	40,370,000
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	10	42,021,000	0	0	0	0	10	42,021,000
3050104007	Brandkas	Buah	1	4,950,000	0	0	0	0	1	4,950,000
3050104014	Mobile File	Buah	3	104,610,000	0	0	0	0	3	104,610,000
3050104015	Locker	Buah	0	0	3	14,999,985	0	0	3	14,999,985
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	5	13,838,000	0	0	0	0	5	13,838,000
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	2	21,336,000	0	0	0	0	2	21,336,000
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	1	16,500,000	0	0	0	0	1	16,500,000
3050105009	Movitex Board	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	0	0	2	7,979,990	0	0	2	7,979,990
3050105017	Mesin Absensi	Buah	2	17,883,800	0	0	0	0	2	17,883,800
3050105028	Overhead Projector	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105044	Mesin Laminating	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	1	10,000,000	0	0	0	0	1	10,000,000
3050105052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	1	4,000,000	0	0	0	0	1	4,000,000
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	dummy	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	4	16,615,000	0	0	0	0	4	16,615,000







**LAPORAN BARANG PENGGUNA  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**UAKPB : 506081 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN**

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM  
Tgl Cetak : 13/05/24 11:05 AM  
Halaman : 5  
Kode Lap : lap\_bmn\_gab\_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100204008	rack Modem	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
5010109002	Jalan Khusus Kompleks	M2	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>				<b>18,340,525,132</b>		<b>1,027,377,132</b>		<b>326,253,300</b>		<b>19,041,648,964</b>

KISARAN, 13 Mei 2024  
Penanggung Jawab UAKPB  
KUASA PENGGUNA BARANG



Ditandatangani secara elektronik  
MELLY MAIESTA  
197605311999032001



**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA  
EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**UAKPB : 506081 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN**

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM  
Tgl Cetak : 13/05/24 11:06 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_susut\_ekstra\_kel\_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
<b>132111</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>		<b>24</b>	<b>16,279,616</b>	<b>(11,541,200)</b>	<b>(2,841,402)</b>	<b>0</b>	<b>(14,382,602)</b>	<b>1,897,014</b>
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-	1	968,000	(968,000)	0	0	(968,000)	0
30501	ALAT KANTOR	-	12	11,880,000	(9,504,000)	(2,376,000)	0	(11,880,000)	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	5	1,566,000	(1,069,200)	(232,200)	0	(1,301,400)	264,600
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	6	1,865,616	0	(233,202)	0	(233,202)	1,632,414
<b>133111</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(1,115,960)</b>	<b>1,115,960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	0	0	(1,115,960)	1,115,960	0	0	0
<b>JUMLAH</b>			<b>24</b>	<b>16,279,616</b>	<b>(12,657,160)</b>	<b>(1,725,442)</b>	<b>0</b>	<b>(14,382,602)</b>	<b>1,897,014</b>

KISARAN, 13 Mei 2024  
Penanggung Jawab UAKPB  
KUASA PENGGUNA BARANG



Ditandatangani secara elektronik  
MELLY MAIESTA  
197605311999032001



**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA  
INTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**UAKPB : 506081 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN**

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM  
Tgl Cetak : 13/05/24 11:06 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_susut\_intra\_kel\_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
131111	Tanah		2,548	7,269,363,000	0	0	0	0	7,269,363,000
20101	TANAH PERSIL	-	2,548	7,269,363,000	0	0	0	0	7,269,363,000
132111	Peralatan dan Mesin		371	3,774,601,588	(2,856,257,578)	(104,525,751)	0	(2,960,783,329)	813,818,259
30103	ALAT BANTU	-	2	183,260,000	(118,438,573)	(25,928,571)	0	(144,367,144)	38,892,856
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	9	1,213,939,149	(880,936,622)	76,596,131	0	(804,340,491)	409,598,658
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-	1	2,099,998	0	(1,049,999)	0	(1,049,999)	1,049,999
30303	ALAT UKUR	-	1	822,766	(822,766)	0	0	(822,766)	0
30501	ALAT KANTOR	-	90	496,746,775	(449,307,200)	(24,387,195)	0	(473,694,395)	23,052,380
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	159	625,710,465	(456,567,900)	(60,066,392)	0	(516,634,292)	109,076,173
30601	ALAT STUDIO	-	10	188,037,802	(160,086,616)	(16,748,358)	0	(176,834,974)	11,202,828
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	2	2,200,000	(2,200,000)	0	0	(2,200,000)	0
31001	KOMPUTER UNIT	-	46	677,881,995	(596,711,830)	7,024,656	0	(589,687,174)	88,194,821
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	51	383,902,638	(191,186,071)	(59,966,023)	0	(251,152,094)	132,750,544
133111	Gedung dan Bangunan		7	7,685,947,960	(833,642,102)	(375,053,535)	0	(1,208,695,637)	6,477,252,323
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	4	7,015,332,960	(777,200,452)	(162,029,416)	0	(939,229,868)	6,076,103,092
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	2	458,438,000	(29,919,528)	(208,201,915)	0	(238,121,443)	220,316,557
40401	TUGU/TANDA BATAS	-	1	212,177,000	(26,522,122)	(4,822,204)	0	(31,344,326)	180,832,674
135121	Aset Tetap Lainnya		52	9,969,500	0	0	0	0	9,969,500
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	52	9,969,500	0	0	0	0	9,969,500
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		6	285,487,300	0	(285,487,300)	0	(285,487,300)	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	1	207,300,000	0	(207,300,000)	0	(207,300,000)	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	1	10,000,000	0	(10,000,000)	0	(10,000,000)	0
31001	KOMPUTER UNIT	-	4	68,187,300	0	(68,187,300)	0	(68,187,300)	0
<b>JUMLAH</b>			<b>2,984</b>	<b>19,025,369,348</b>	<b>(3,689,899,680)</b>	<b>(765,066,586)</b>	<b>0</b>	<b>(4,454,966,266)</b>	<b>14,570,403,082</b>

KISARAN, 13 Mei 2024  
Penanggung Jawab UAKPB  
KUASA PENGGUNA BARANG



Ditandatangani secara elektronik  
MELLY MAIESTA  
197605311999032001





**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA  
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**UAKPB : 506081 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN**

Tgl.Data : 13/05/24 6:00 AM  
Tgl.Cetak : 13/05/24 11:19 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_neraca\_face\_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	16,031,288
131111	Tanah	7,269,363,000
132111	Peralatan dan Mesin	3,774,601,588
133111	Gedung dan Bangunan	7,685,947,960
135121	Aset Tetap Lainnya	9,969,500
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2,960,783,329)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,208,695,637)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	285,487,300
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(285,487,300)
<b>J U M L A H</b>		<b>14,586,434,370</b>

KISARAN, 13 Mei 2024  
Penanggung Jawab UAKPB  
KUASA PENGGUNA BARANG



Ditandatangani secara elektronik  
MELLY MAIESTA  
197605311999032001



**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA  
POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2023(SALDO AWAL)  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**UAPB : 015**  
**UAKPB : 506081**

**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN**

Tanggal : 13/05/24 11:08 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_neraca\_sawal\_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	5,690,788
131111	Tanah	7,066,601,000
132111	Peralatan dan Mesin	3,761,880,672
133111	Gedung dan Bangunan	7,483,185,960
135121	Aset Tetap Lainnya	9,969,500
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2,856,257,578)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(833,642,102)
<b>J U M L A H</b>		<b>14,637,428,240</b>

Kisaran, 13 Mei 2024  
Penanggung Jawab UAKPB  
Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik  
Melly Maiesta  
197605311999032001

